

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah yang memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan, mengurus, dan mengatur seluruh kepentingan pemerintahan dan masyarakat khususnya pada pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan keuangan daerah.¹ Selain itu, Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tugas dan aktivitas yang dilaksanakannya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap seluruh pelaksanaan tugas dan aktivitas organisasi yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, makna dari bentuk pertanggungjawaban publik yaitu berdasarkan pada hukum, peraturan, regulasi, dan nilai-nilai yang dianut oleh pegawai terkait.² Akuntabilitas seringkali disamakan dengan *responsibility*, namun kedua istilah ini mengandung makna yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban terhadap suatu hal yang telah dan harus dicapai sedangkan *responsibility* merupakan kewajiban untuk bertanggungjawab.³ Sehingga, pemerintah daerah harus menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada masyarakat

¹ *Undang Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (2014), 4.

² Idris P atari, “*Ombudsman Dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*” (Makassar: De La Macca 2015), 30.

³ Bevaola Kusumasari, dkk, “*Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*”, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015), 7.

berupa hasil pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menyatakan bahwa pemerintahan daerah harus menyajikan informasi laporan keuangan daerah dengan komplit dan menyeluruh sehingga mampu meningkatkan integritas dan mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah dilaksanakan melalui perantara para pejabat pemerintahan keuangan atau pegawai organisasi perangkat daerah. Hal ini, sejalan dengan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah bahwa pejabat pengelolaan keuangan yang melaksanakan dan menjalankan seluruh aktivitas akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peran pemerintah daerah pada pelaksanaan akuntabilitas publik yaitu sebagai penyedia informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Sebagaimana disebutkan pada teori *Stewardship* dimana para manajer lebih cenderung memberikan manfaat yang maksimal terhadap tujuan organisasi daripada kepentingan pribadinya.⁴ Dalam hal ini pemerintah daerah bertindak sebagai *steward* yang berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah berupa hasil pengelolaan keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat (*principal*).

⁴ Pancawati Hardiningsih dkk, "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang),” AKTSAR Vol. 2 No. 1, (Juli, 2019), 21-42.

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud secara efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kompetensi pegawai. Pegawai yang bertugas menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan adalah pegawai yang memiliki kompetensi yang baik, integritas dan kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian Era Wijayanti (2021) dimana kemampuan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.⁵

Faktor lain yang memberi pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi (TI). Teknologi informasi berperan penting dalam proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Dari penelitian Nila Arum Cahyati (2021) menyebutkan Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.⁶ Hal ini sesuai dengan penelitian Ennida Novanti (2021) yang juga menyebutkan Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.⁷ Jadi teknologi informasi yang memadai dan dimanfaatkan dengan

⁵ Era Wijayanti, "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Sistem Pengendalian Internal, Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo), (Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2021)", 1150-153.

⁶ Nila Arum Cahyati, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Se-Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan), (Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2021)", 75.

⁷ Ennida Novanti, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2019 (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara), (Universitas Islam Nahdlatul Ulama 2021)", 91.

baik dapat membantu untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara baik.

Sistem Pengendalian Internal juga berperan dalam menciptakan akuntabilitas keuangan daerah yang baik dan memberikan jaminan yang yang baik untuk mencapai tujuan pemerintah daerah.⁸ Sebagaimana disebutkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal yang menyebutkan bahwa dibutuhkan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan sehinggadapat terlaksana dengan baik. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dalam penelitian Pancawati Hardiningsih, Rachmawati Meita O., Ceacilia Srimindarti, dan Ida Kristiana (2019) SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.⁹ Hal ini sesuai dengan penelitian Lilis Puspitawati dan Mega Marisa Effendy (2021) yang juga menyebutkan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah.¹⁰

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD TA 2021. Pemerintah Kabupaten Sumenep berhasil mendapatkan penghargaan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bupati Kabupaten Sumenep dan pimpinan DPRD mendapatkan penghargaan WTP yang diberikan oleh Kepala BPK

⁸ Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba Edisi 3*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 143.

⁹ Ibad, Pancawati Hardiningsih dkk, 21-42.

¹⁰ Lilis Puspitawati dan Mega Marisa Effendy, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Survei Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung)", *Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* Vol. 9 No. 1 (Mei 2021): 43, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>.

Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo pada tanggal 16 Mei 2022.¹¹ Penghargaan WTP ini merupakan penghargaan yang diperoleh untuk kelima kalinya sejak tahun 2017 oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Adapun penghargaan WTP ini diberikan kepada pemerintah daerah yang sudah berhasil mendapat prestasi pertanggungjawaban pada aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat.

Namun meskipun Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memperoleh opini WTP, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan dari hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2021. Namun pada implementasinya tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Hal ini, dibuktikan dari temuan-temuan BPK terhadap adanya kelemahan pada penatausahaan keuangan dan pengendalian internal. Fenomena tersebut diantaranya ketidakmaksimalan atas realisasi belanja khususnya pada terlambatnya dan tidak terlaksananya pertanggungjawaban realisasi belanja hibah dan bantuan sosial dari sebelas OPD. Disamping itu, pada bagian Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan jaringan kurang volume. Selain itu, denda atas terlambatnya pekerjaan juga belum diambil dari 4 OPD.¹²

Kendali dan hambatan lainnya juga disebutkan dalam laporan bulanan, yaitu adanya kendala pada proses realisasi penyerapan anggaran di beberapa

¹¹ Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, "BPK Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 Kepada Lima Pemerintah Daerah," diakses dari Siaran Pers BPK: <https://jatim.bpk.go.id/siaran-pers/bpk-serahkan-laporan-hasil-pemeriksaan-atas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-tahun-anggaran-2021-kepada-lima-pemerintah-daerah-2/>, pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 20.58 WIB

¹² Ibid, Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

bidang pada OPD di Kabupaten Sumenep.¹³ Keterlambatan penyerapan anggaran ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak lancar, apabila hal ini terus terulang maka dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun salah satu faktor penyebab tidak optimalnya penyerapan realisasi anggaran ini yaitu tidak adanya perencanaan terstruktur oleh bagian penatausahaan terkait dengan identifikasi kegiatan yang berpotensi di awal tahun misalnya aktivitas operasional instansi.¹⁴

Kendala lainnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan pengadaan Teknologi Informasi (TI), hal ini dinyatakan dalam penelitian Astri Furqani dan Rusnani dimana kesiapan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan internal masih belum memadai dalam ketersediaan infrastruktur untuk penerapan TI.¹⁵ Adapun hambatan di bagian infrastruktur ini berhubungan dengan kualitas provider jaringan internet yang masih kurang memadai. Selain itu, pemerintahan juga kurang memfasilitasi daya listrik sehingga sering terjadi korsleting listrik.

Berdasarkan fenomena diatas, Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat dikatakan belum mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Melihat akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pada pemerintah

¹³ BKPSDM, "Laporan Bulanan Bulan Desember 2022," diakses pada Bkpsdm.sumenepkab.go.id, pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 14.55 WIB.

¹⁴ Yunus Ariwibawa, "Strategi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga Di Akhir Tahun 2022," diakses dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/strategi-penyerapan-anggaran-kementerianlembaga-di-akhir-tahun-2022>, pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 20.44 WIB.

¹⁵ Astri Furqani dan Rusnani, "Kesiapan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Sumenep)," Gayana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2021), 164, <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya>.

daerah untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara baik dan akuntabel untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, masyarakat dan para pengguna informasi dapat menilai kinerja pemerintahan daerah.¹⁶

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsi untuk memperkuat teori Stewardship dalam menjaga kepentingan steward dan prinsipal dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara baik. Selanjutnya untuk kontribusi praktisnya diharapkan memberi informasi untuk lembaga pemerintah dan dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Abdul Hafidz Tanjung, “Akuntansi Pemerintahan Daerah (Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan),” (Bandung: Penerbit ALFABETA 2009), 9.

1. Apakah Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?
4. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga memberikan kegunaan secara teoritis dan praktisi terhadap beberapa pihak, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang akuntansi khususnya mengenai Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)

b. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan tambahan karya untuk perpustakaan IAIN Madura dan referensi bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Program Studi Akuntansi Syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan konsep serta dijadikan acuan dan bahan kajian untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep yang diteliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk memberikan batasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian.¹⁷ Ruang lingkup variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu variabel independen (X) yang terdiri atas variabel Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan (X1) variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) dan variabel Sistem Pengendalian Internal (X3). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Adapun lingkup populasi dalam penelitian ini adalah 24 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terdiri dari beberapa kedinasan dan badan daerah khususnya di bagian keuangan atau penatausahaan keuangan.

F. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar yang berkaitan dengan masalah penelitian yang mana kebenarannya dapat diuji dengan melakukan observasi dan percobaan dalam penelitian. Adapun fungsi dari asumsi pada suatu penelitian diantaranya adalah untuk mempertegas variabel yang diteliti, untuk menentukan dan merumuskan hipotesis, dan juga sebagai landasan dasar dalam berpikir dan

¹⁷ Institut Agama Islam Negeri Madura, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Revisi*, (Pamekasan, Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), 19.

bertindak dalam melakukan penelitian.¹⁸ Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kompetensi pegawai penatausahaan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal.

Adapun variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan, yaitu sebagai berikut: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah¹⁹, Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)²⁰, Prinsip Transparansi²¹, Sistem Pengendalian Internal²², Pemanfaatan teknologi informasi²³, Aksesibilitas laporan keuangan²⁴, Kualitas Laporan Keuangan²⁵. Sementara itu, variabel pada penelitian ini adalah kompetensi pegawai penatausahaan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, Sedangkan variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini diantaranya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Prinsip Transparansi, Aksesibilitas laporan keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara tentang masalah penelitian dimana kebenaran terkait dengan penelitian masih harus diuji secara

¹⁸ Institut Agama Islam Negeri Madura, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Revisi, (Pamekasan, Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), 17-18.

¹⁹ Zeny Antika, dkk, "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah", Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Vol 15 No. 2 (2020): 212-232, <http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi>.

²⁰ Ibid, Era Wijayanti.

²¹ Ibid, Era Wijayanti.

²² Ibid, Lilis Puspitawati dan Mega Marisa Effendy.

²³ Ibid, Ennida Novanti.

²⁴ Ibid, Zeny Antika, dkk.

²⁵ Ibid, Lilis Puspitawati dan Mega Marisa Effendy.

empiris. Adapun hipotesis ini dibagi ke dalam dua macam yaitu hipotesis nol (H_0) yang merupakan suatu rumusan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara dua variabel. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah rumusan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan atau pengaruh di antara kedua variabel.²⁶

Berikut hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)

H_{01} : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)

H_2 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)

H_{02} : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)

²⁶ Institut Agama Islam Negeri Madura, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Revisi, (Pamekasan, Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), 18-19.

H₃: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)

H₀₃: Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)

H₄: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)

H₀₄: Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep)

H. Definisi Istilah

Definisi istilah bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian ataupun kurang jelasnya makna. Oleh karena itu, peneliti mendefinisikan istilah istilah yang digunakan dalam judul penelitian, adapun definisi istilah ini yaitu:

1. Kompetensi Pegawai

Kompetensi pegawai adalah Kemampuan yang digunakan dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan efisien, kompetensi ini berupa pengetahuan dan karakteristik yang harus dimiliki pegawai.²⁷

²⁷ Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Uji Kompetensi Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (2019), 5.

2. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu alat dipakai untuk mengolah data yang berupa pemrosesan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.²⁸

3. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh seluruh lapisan mulai dari dewan komisaris, manajemen dan individu lainnya dalam sebuah lembaga untuk memberikan jaminan dalam tercapainya keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.²⁹

4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan dan standar akuntansi pemerintah.³⁰

I. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu mengenai Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Peneliti menggunakan penelitian

²⁸ Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012), 23.

²⁹ I Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi dan Implementasinya Dalam Koperasi dan UMKM*. (Depok: Rajawali Press, 2018), 157.

³⁰ Tjahjanulin Domai, *Manajemen Keuangan Publik*, (Malang: UB Press, 2010), 46.

dahulu sebagai tolak ukur kerangka teoritik dan untuk melihat adanya pembaharuan pada penelitian ini.

Tabel 1. 1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zeny Antika, dkk (2020)	“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”	Variabel Independen (X): 1. “Sistem akuntansi keuangan daerah 2. aksesibilitas laporan keuangan 3. Pengendalian internal Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah”	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kelurahan di Kota Bekasi
2.	Pancawati Hardiningsih dkk (2019)	“Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Independen (X): 1. “Penyajian	Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh

		(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang)”	<p>laporan keuangan</p> <p>2. Value For Money</p> <p>3. Sistem pengendalian internal</p> <p>4. Aksesibilitas laporan keuangan</p> <p>Variabel Dependen (Y): Pengelolaan Keuangan Daerah”</p>	<p>penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Tetapi nilai uang (Value For Money) tidak mempengaruhi akuntabilitas manajemen keuangan daerah.</p>
3.	Handayani Tri Wijayanti dan Aris Tri Haryanto (2021)	“Analisa Aspek Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>1. “Kompetensi pejabat penatausahaan Keuangan Daerah,</p> <p>2. Sistem Pengendalian</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal,</p>

		Penyusunan Laporan Keuangan Daerah”	Internal, 3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Variabel Dependen (Y): Penyusunan Laporan Keuangan Daerah”	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
4.	Era Wijayanti (2021)	“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Sistem Pengendalian Internal, Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (Studi Empiris Pada	Variabel Independen (X): 1. “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 2. Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 3. Sistem Pengendalian	“Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kemampuan pejabat penatausahaan keuangan (ppk), sistem pengendalian internal, dan prinsip transparansi” berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

		Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo))”	Internal 5. Prinsip Transparansi Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”	“akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo”
5.	Ennida Novanti (2021)	“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2019 (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)”	Variabel Independen (X): 1. “Kompetensi aparat pengelola dana desa 2. Komitmen organisasi pemerintah desa 3. Pemanfaatan teknologi informasi Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019”	Hasil dari penelitian ini “Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi” mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pecangaan”. Sedangkan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

				berpengaruh positif tidak signifikan (tidak berpengaruh) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jepara
6.	Nilai Arum Cahyati (2021)	“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Se-Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)“	<p>Variabel Independen (X):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Partisipasi Penganggaran 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”</p>	<p>Hasil dari penelitian ini secara Parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penganggaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan secara simultan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan</p>

				pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas Desa di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
7.	Lilis Puspitawati dan Mega Marisa Effendy (2021)	“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Survei Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Skpd) Kota Bandung)”	Variabel Independen (X): 1. “Kualitas Laporan Keuangan 2. Pengendalian Internal Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Keuangan”	Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kualitas penyajian laporan dan efektivitas pengendalian internal merupakan faktor yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

8.	Indah Fajriyah (2022)	“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, <i>Value For Money</i> Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei Pada Skpd Di Kabupaten Cirebon Tahun 2020)”	Variabel Independen (X): 1. “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. <i>Value For Money</i> 3. Sistem Pengendalian Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, <i>value for money</i> dan sistem pengendalian internal berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
----	-----------------------------	--	---	---

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, penelitian ini akan meneliti tentang Kompetensi Pegawai Penatausahaan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep).

Adapun perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sudah mendapatkan penghargaan berupa opini WTP. Tetapi, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan BPK. Penggunaan variabel independen dan objek yang digunakan pada penelitian ini juga berbeda

dengan peneltilian-penelitian terdahulu dimana pada penelitian ini variabel independennya adalah kompetensi pengawai, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Sementara objek yang digunakan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumenep.